



**IMPLEMENTASI PENCAIRAN SERTA PENGELOLAAN  
DANA DESA ( DD ) DAN ALOKASI DANA DESA ( ADD )  
DI KECAMATAN KARANGDADAP  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020**

**TESIS**

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan guna Memperoleh Gelar  
Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Disusun Oleh:

**JUNI INRAWATI**

NIM: 201003631010470

Program Studi: Magister Administrasi Publik

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG**

**2022**



**IMPLEMENTASI PENCAIRAN SERTA PENGELOLAAN  
DANA DESA ( DD ) DAN ALOKASI DANA DESA ( ADD )  
DI KECAMATAN KARANGDADAP  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020**

Disusun Oleh:

**JUNI INDRAWATI**

NIM: 201003631010470

Program Studi: Magister Administrasi Publik

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera di bawah

ini

1. Dr. Tri Lestari Hadiati, M.Si  
Ketua Tim Penguji/ Pembimbing

2. Dr. Karmanis, M.Si  
Penguji I

.....  
.....

Mengesahkan

Dekan FISIP UNTAG Semarang

.....  
.....

Dr. Dra. Rini Werdiningsih, M.Si  
NIDN: 0621105901



**IMPLEMENTASI PENCAIRAN SERTA PENGELOLAAN  
DANA DESA ( DD ) DAN ALOKASI DANA DESA ( ADD )  
DI KECAMATAN KARANGDADAP  
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020**

Disusun Oleh:

**JUNI INDRAWATI**

NIM: 201003631010470

Program Studi: Magister Administrasi Publik

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi Program Studi Magister Administrasi Publik, telah disetujui oleh Pembimbing dan Ketua Program Studi pada tanggal seperti tertera di bawah ini Semarang, 4 Pebruari 2022

Pembimbing I

Dr. Dra. Tri Lestari Hadiati, M.Si  
NIDN: 0618056501

Penguji

Dr. Dra. Karmanis, M.Si  
NIDN: 0605066601

Menyetujui  
Ketua Program Studi Magister Administrasi

Dr. Dra. Tri Lestari Hadiati, M.Si  
NIDN: 0618056501



## **ABSTRACT**

*The enactment of Law No. 6 of 2014 concerning Villages provides a new color for the Village in the administration of Government from the Central, Regional to Village levels. This is based on the importance of realizing good government starting from the central government level to the village level. In Law No. 6 of 2014 it gives more confidence to the Village to regulate its own Village because the Village has its own legal umbrella. In order to accelerate the pace of development, the central government provides billions of aid to the Village in the form of Village Funds and Village Fund Allocations which are a source of Village income.*

*The aims of this research are to provide the description of implementation of Rural Fund Allocation in Geyer County-Grobogan Regency, to describe the supporting and pursuing factors that influence the implementation and strategy done to succeed policy implementation as well as to provide a recommendation for local government in managing Rural Fund Allocation.*

*The method used in this research is descriptive-qualitative method in where as main instrument is the researcher himself. The data sources used are primary and secondary datas related with emphirical situation and condition of policy implementation. In this research, the writer also uses survey research to obtain primary data of policy of rural fund allocation in Karangdadap County-Pekalongan Regency. Based on the data available, the writer tries to describe systematically, factually, and accurately about facts, natures as well as the relationship among phenomenon available.*

*The research results show that the policy implementation of rural fund allocation (Alokasi Dana Desa/AAD)in Karangdadap County-Pekalongan Regency is running well. However, in relationship with achieving goal, the implementation of rural fund allocation in Karangdadap County- Pekalongan Regency has not been optimal. Although the aim of increasing in administering governance, development and social community have implemented optimally, the aim of increasing capacity of community institution has not run optimally. The community participation in selfempowerment of solidarity/mutualaid has not been optimal. Some factors that influence implementation of Rural Fund Allocation (Alokasi Dana Desa/AAD) in Karangdadap County- Pekalongan Regency are communication, human resource capacity, implementers' attitude, bureaucracy structure, inveronment, and the parameter and aim of policy.*

**Keywords:** *Villages, Village Funds and Village Fund Allocation*



## ABSTRAKS

Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan warna baru bagi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Tingkat Pusat, Daerah sampai dengan Desa. Hal ini didasarkan atas pentingnya mewujudkan pemerintah yang baik yang dimulai dari level Pemerintah Pusat sampai Desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014 ini lebih memberikan kepercayaan bagi Desa untuk mengatur Desanya sendiri karena Desa mempunyai Payung hukum tersendiri. Dalam rangka mempercepat laju pembangunan Pemerintah pusat memberikan bantuan miliaran kepada Desa berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang merupakan sumber pendapatan Desa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, serta faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi Pencairan serta Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi Pencairan serta Pengelolaan selain itu juga akan memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi Pencairan serta Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi dana Desa. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian survey guna memperoleh data primer mengenai Pencairan serta pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Dengan berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pencairan serta Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, serta lingkungan.

***Kata Kunci : Desa, Dana Desa dan Alokasi Dana Desa***